

A. Latar Belakang

Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Berdirinya organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya *ASEAN Declaration* oleh lima menteri luar negeri dari Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tun Abdul Razaq), Filipina (Narciso R. Ramos), Singapura (S. Rajaratnam), dan Thailand (Thanat Khoman) di Bangkok, Thailand (ASEAN, 2020). Dalam perkembangannya, ASEAN yang tadinya beranggotakan 5 negara, saat ini keanggotaan ASEAN bertambah menjadi 11 negara anggota dengan tambahan Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. ASEAN memiliki tujuan agar setiap negara anggotanya dapat terintegrasi dan bekerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya. Hal itulah yang kemudian melahirkan *ASEAN Community* yang dideklarasikan pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 2009 yang didalamnya terdapat 3 pilar utama yaitu politik keamanan (*ASEAN Political Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio Cultural Community*) (Nulhaqim et al., 2016).

Komunitas ASEAN dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekurangan pada peran publik sebagai aktor penmgambil keputusan. Hal tersebut menimbulkan adanya anggapan kepada elitis yang sewenang-wenang pada pembuat kebijakan ASEAN. Opini public disini sangat penting untuk memberikan tingkat legitimasi tertentu pada proses integrasi regional. Inisiatif semacam itu tidak hanya melibatkan para pemimpin dan pembuat kebijakan akan tetapi juga orang-orang di semua lapisan masyarakat (Benny & Moorthy, 2015). Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu upaya optimalisasi peran publik dalam kesuksesan komunitas ASEAN melalui hubungan *people to people*.

. Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui kegiatan pengabdian masyarakat merupakan implementasi dari tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Seluruh perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melaksanakan program tersebut tidak terkecuali Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Selain kegiatan KKN yang dilakukan di berbagai desa binaan di Indonesia, UMY melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) bekerja sama dengan Progam Studi Hubungan Internasional memiliki skema KKN Internasional. Salah satu program KKN Internasional tersebut dilaksanakan di wilayah Mindanao, Filipina dengan bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City. Program KKN ini sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2022. Total sudah ada 116 mahasiswa yang diterjunkan pada skema KKN ini. Pada tahun 2022, program KKN Internasional tersebut tidak hanya dilakukan oleh UMY melainkan bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) lain yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Program KKN ini dilaksanakan di beberapa wilayah di Mindanao seperti Davao City, General Santos City, Glan, dan Laensasi. Kegiatan KKN Davao ini memiliki tujuan tambahan yaitu memberikan pendampingan dokumen kewarganegaraan serta meningkatkan jiwa nasionalisme kepada warga keturunan Indonesia yang berada di Mindanao (Muhammadiyah, 2022).



*Gambar 1 Kegiatan Pengenalan Presiden Indonesia
Sumber: Dokumen Pribadi*

Pada kegiatan KKNi Davao dilakukan berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat diaspora Indonesia yang tinggal disana. Program tersebut antara lain pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas SDM. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan kelompok KKNi 2022 yang ditempatkan di wilayah Laensasi yaitu: pengenalan geografi Indonesia, pengenalan Presiden Indonesia, pendidikan Bahasa Indonesia dasar, pengenalan lagu nasional Indonesia, kegiatan upacara hari kemerdekaan, pelatihan pengolahan makanan, pelatihan pembuatan batik jumputan, dan pelatihan permainan angklung.

B. Rumusan Masalah

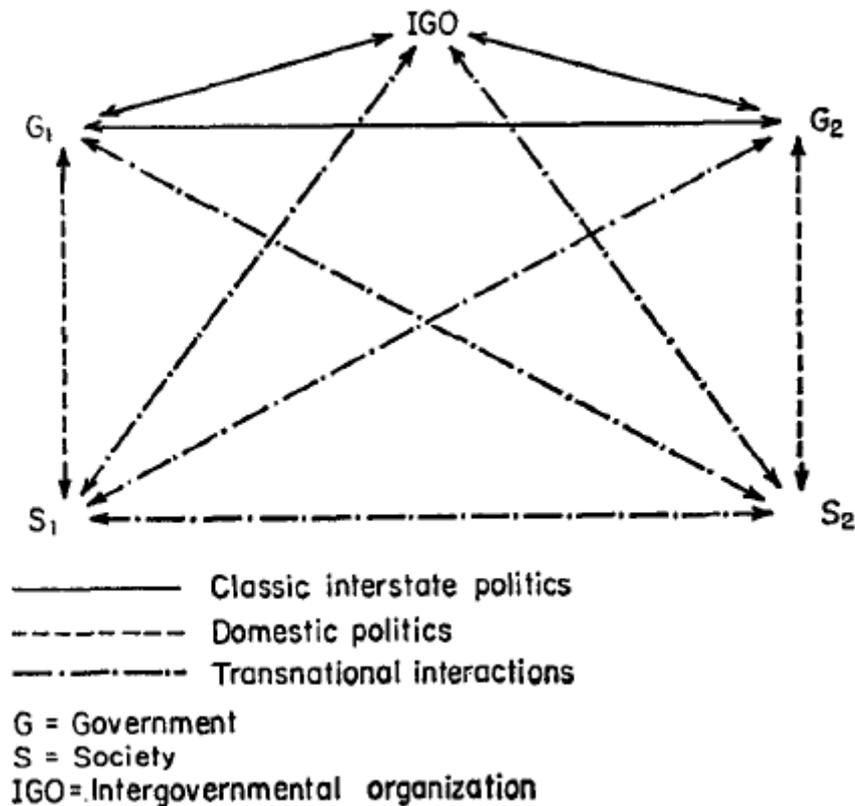
Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Internasional tersebut, timbul suatu pertanyaan bagaimana kontribusi Kuliah Kerja Nyata Internasional UMY dalam mewujudkan ASEAN *Community*?

C. Kerangka Teori

1. Hubungan Transnasional

Pada awalnya, kita mengenal negara sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan politik internasional. Namun, dengan hadirnya globalisasi muncul aktor-aktor bukan negara yang berhubungan satu dengan lainnya yang memberikan dampak kepada politik dunia. Hubungan tersebut yang kemudian disebut hubungan transnasional. Joseph Nye dan Robert Keohane mendefinisikan hubungan transnasional sebagai kontak, koalisi, dan interaksi lintas batas negara yang tidak dikendalikan oleh organ kebijakan luar negeri pusat pemerintah (Nye & Keohane, 1971). Dalam artikel yang sama juga dijelaskan akibat dari hubungan transnasional yaitu: 1) Mendorong perubahan sikap yang memiliki konsekuensi terhadap kebijakan suatu negara, 2) Promosi pluralisme internasional dengan terhubungnya suatu kelompok kepentingan domestik dalam struktur transnasional, 3) Munculnya ketergantungan yang dapat menghambat negara, 4)

INTERNATIONAL ORGANIZATION



Gambar 2 Diagram Hubungan Transnasional
Sumber: Nye & Keohane, 1971

Peningkatan kemampuan pemerintah tertentu untuk mempengaruhi yang lain seperti dengan "penetrasi informal", 5) Kemunculan aktor otonom dengan kebijakan luar negeri yang bersifat privat.

Pada diagram di atas ditunjukkan bahwa hubungan transnasional dapat dilakukan oleh suatu pemerintah terhadap masyarakat di negara lain maupun antar masyarakat di dua wilayah negara yang berbeda. Dalam tulisan ini, yang menjadi aktor hubungan transnasional tersebut adalah antara masyarakat Indonesia yang diwakili oleh peserta KKNI dengan PIDs di wilayah kerja KJRI Davao City, Filipina yang juga menjadi sasaran kegiatan KKNI. Orang Indonesia yang sudah tinggal di wilayah Mindanao apabila diruntut, mereka sudah bermigrasi sejak abad ke-17 karena kemiskinan, keterbelakangan, dan juga karena wilayah yang rawan bencana (gunung meletus) dari wilayah pulau Sangir dan Marore. Gelombang migrasi selanjutnya setelah kemerdekaan Indonesia dan Filipina terjadi karena akibat dari pembersihan komunis besar-besaran pada 1950 dan adanya kesempatan ekonomi di Mindanao dibawah pemerintahan kolonial Amerika. Permasalahan kemudian terjadi karena orang-orang tersebut telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia-nya karena sudah lama menetap dan memiliki keturunan di wilayah Filipina, meskipun mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang Indonesia (R.T & Baidawi, 2020).



Gambar 3 Peta Lokasi Penempatan KKNi
Sumber: Google

2. Soft Power Diplomacy

Dalam *Dictionary of Diplomacy*, diplomasi bermakna penyelenggaraan hubungan antara negara berdaulat melalui perantara pejabat yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri yang nantinya dapat menjadi pejabat diplomasi ataupun diplomat sementara dari negara asalnya. Diplomasi adalah sistem komunikasi internasional yang memungkinkan adanya hubungan antar negara baik berupa hubungan yang biasa maupun hubungan yang kompleks (Berridge & James, 2003).

Pada masa lalu, Diplomasi digunakan dengan pendekatan militer dimana negara berlomba-lomba memamerkan kekuatannya sebagai nilai jualnya di percaturan dunia. Namun, dengan perlombaan militer tersebut memberikan peluang terjadinya perang secara fisik lebih besar. Dengan begitu, diplomasi berkembang dengan munculnya pendekatan soft power diplomacy (Shabrina, 2017). Pendekatan soft power ini digunakan untuk mencapai kepentingan suatu negara dengan tanpa melakukan pemaksaan melainkan dengan kerja sama bersama negara lain (Nye, 1990).

Bentuk soft power diplomacy yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mindanao. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa dapat membantu masyarakat di sana dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Hal ini dapat membantu memperkuat hubungan antara Indonesia dan masyarakat di Mindanao, serta memperkuat rasa persaudaraan antara mereka dan Indonesia.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan. Tujuan didirikannya organisasi adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.

Seiring berkembangnya jaman, gerakan Muhammadiyah mulai masuk ke dalam kancah Internasional. Dalam Seminar Pra Mukhtamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 30 Mei 2022, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan seminar mengenai “Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah”. Dalam seminar tersebut, beliau menyampaikan enam poin untuk mewujudkan program Internasionalisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah revitalisasi PCIM dan PCIA sebagai sebuah jaringan baru untuk semakin intensif hadir di setiap negara dan membangun jaringan luas agar berperan di ranah global secara proaktif. Saat ini, terdapat sekitar 27 PCIM yang sudah mendapat pengakuan badan hukum dari otoritas negara setempat diantaranya di Australia, Malaysia, Jerman, dan Amerika Serikat. Poin kedua adalah program kontinuitas forum-forum dunia untuk agama dan perdamaian. Beliau berharap peran agama dapat secara aktif dapat menciptakan perdamaian di dunia mengingat saat ini dunia internasional sedang dalam kondisi yang rawan akan terciptanya konflik. Ketiga, Interkoneksi kerja sama pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan kemanusiaan yang selama ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Dalam hal ini, kehadiran Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah sosial kemanusiaan perlu diperluas di kancah Internasional. Keempat, diaspora kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah diharapkan dapat berperan besar di negara tempat mereka berada saat ini, menjadi kader sekaligus aktor yang potensial untuk dapat berperan sesuai dengan bidang dan kepentingan Muhammadiyah di ranah global. Poin kelima yaitu publikasi Internasional. Dalam hal ini kehadiran perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sangat diperlukan untuk dapat memperluas ranah keilmuan serta memperluas nilai-nilai Muhammadiyah. Poin terakhir yaitu membangun pusat unggulan. Pusat keunggulan ini dapat digunakan untuk gerakan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah yang nyata dan konkret agar dampak kehadiran Muhammadiyah dapat dirasakan secara langsung (Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2022).

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan salah satu usaha organisasi Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan. UMY sendiri memiliki visi yaitu “Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat.” Dalam mewujudkan tersebut, UMY memiliki 4 visi yaitu: 1.) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berstandar internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 2.) Menyelenggarakan penelitian berbasis keunikan lokal dalam penyelesaian permasalahan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3.) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan; dan 4.) Melakukan peran sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Islam dan gerakan Muhammadiyah (UMY, 2019).

4. Community Services

Program *Community Services* atau di Indonesia lebih dikenal dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diartikan sebagai suatu sarana dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama kegiatan perkuliahan dengan cara pengabdian secara riil kepada masyarakat.

Mahasiswa dapat melakukan eksplorasi akan kebutuhan suatu lingkungan dan mencari bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan komunitas masyarakat tersebut. Dengan cara ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam praktek profesional yang menciptakan proses pembelajaran yang kuat. Di satu sisi, KKN dapat membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan dan keterampilannya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat secara langsung sebagai bentuk kontribusi, dan media untuk membangun hubungan yang integral dengan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk terhubung dengan komunitas yang lebih luas dari orang-orang yang mendukung di komunitas mereka, untuk melihat secara langsung bagaimana orang bekerja sama untuk memecahkan masalah kolektif, dan untuk menyadari identitas mereka sendiri sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepentingan bersama (Flanagan et al., 2015).

Di sisi lain, masyarakat sendiri akan terbantu secara mendapatkan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama masa KKN. Idealnya, program ini dapat membuka potensi untuk belajar tentang berbagai hal termasuk kemiskinan, perbedaan kelas, dan inklusifitas di lingkungan yang sangat beragam, tentang hambatan komunikasi dan masalah psikologi sosial dalam konteks masyarakat. Mahasiswa juga dapat belajar tentang kompleksitas hukum migrasi, hak asasi manusia, hukum perburuhan, ketentuan hukum yang terkait dengan hak-hak sosial, hukum anti-diskriminasi, maupun hukum properti. Semua masalah yang saling terkait ini muncul dari apa yang dialami mahasiswa secara langsung, dan tidak semata-mata dari literatur ilmiah dan catatan kelas. Mahasiswa dapat mengeksplorasi bagaimana disiplin ilmu yang berbeda saling terkait dan meningkatkan kapasitas mereka untuk penalaran dalam menanggapi berbagai kebutuhan sosial (Claes et al., 2022).

Berbeda dengan program KKN yang dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, program KKN Internasional yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri. Selain karena pelaksanaannya yang dilakukan di luar negeri (Filipina), ada permasalahan lebih yang dialami masyarakat disana. Menurut rektor UMY, Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., Misi utama mengirim mahasiswa dalam program KKN di Davao ini adalah melayani masyarakat Indonesia yang tinggal di sana selama puluhan tahun dalam kondisi yang relatif marginal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. Di Davao, ada ribuan PID yang tidak jelas kewarganegaraannya, atau dengan kata lain, '*stateless*'. Ini adalah tanggung jawab peserta untuk memenuhi aspek sosial di luar upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hukum mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang terdaftar (Ilman et al., 2019).

5. ASEAN Community

Filipina dan Indonesia terletak di wilayah yang berdekatan yaitu di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini bersama dengan sembilan negara Asia Tenggara lain tergabung dalam organisasi regional *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan penandatanganan ASEAN Declaration. Organisasi ini pada mulanya bertujuan hanya sebatas menangani isu keamanan dan

perdamaian di kawasan. Namun, seiring berkembangnya jaman, ASEAN juga berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2003 melalui Declaration of ASEAN Concord II, dibentuklah komunitas ASEAN (ASEAN Community) 2015. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yaitu: Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community-APSC), Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC), dan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC) (Nulhaqim et al., 2016).

Pilar pertama Komunitas ASEAN 2015 yaitu APSC bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini hidup damai satu sama lain dan dengan dunia dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. Anggota Komunitas berjanji untuk mengandalkan secara eksklusif pada proses damai dalam penyelesaian perbedaan intra-regional dan menganggap keamanan mereka secara fundamental berkaitan satu sama lain dan terikat oleh lokasi geografis, visi dan tujuan bersama.

Pada pilar kedua, ASCC bekerja menuju: Komunitas yang berkomitmen, partisipatif, dan bertanggung jawab secara sosial untuk kepentingan masyarakat ASEAN; Komunitas inklusif yang mempromosikan kualitas hidup yang tinggi, akses yang adil terhadap peluang bagi semua, dan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia; Sebuah komunitas yang berkelanjutan yang mempromosikan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan; Sebuah komunitas yang tangguh dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk beradaptasi dan menanggapi kerentanan sosial dan ekonomi, bencana, perubahan iklim, dan tantangan baru lainnya; dan Komunitas yang dinamis dan harmonis yang sadar dan bangga akan identitas, budaya, dan warisannya. Untuk mencapai hal ini, negara anggota bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk: budaya dan seni, media informasi, pendidikan, pemuda, olahraga, pembangunan dan kesejahteraan sosial, gender, hak perempuan dan anak, pembangunan pedesaan dan pemberantasan kemiskinan, tenaga kerja, layanan sipil, lingkungan, penanggulangan bencana, serta bantuan kemanusiaan dan kesehatan

Pelaksanaan pilar ketiga ASEAN Community 2015 (AEC) adalah semakin bebas dan terbukanya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal pada tahun 2015 kedepan. AEC atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diharapkan dapat semakin memperdalam integrasi ekonomi dan mewujudkan masyarakat ekonomi yang lebih terintegrasi dengan ciri-ciri: Ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif; ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral; ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; Terintegrasi dengan ekonomi global.

Ketiga pilar dalam ASEAN Community tersebut saling melengkapi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi, pergerakan barang dan jasa serta investasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dimensi keamanan yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi tersebut. Begitu juga dengan aspek sosial-budaya, yang diperlukan untuk pengembangan rasa kebersamaan dan solidaritas, termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Harapannya, ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara (equal), akan semakin mempercepat integrasi ekonomi sebagai pilar utama ASEAN Community (Hakim, 2015).

D. Hipotesis

Dari penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis bahwa KKNi UMY merupakan suatu program yang dapat berkontribusi dalam terwujudnya komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya, yaitu:

1. Memperkuat kerja sama politik keamanan komunitas ASEAN dalam menurunkan potensi konflik antar masyarakat ASEAN melalui pendekatan agama.
2. Memperkuat kerja sama sosial budaya masyarakat ASEAN dengan meningkatkan hubungan baik PIDs dengan dengan pemangku kebijakan dan masyarakat lokal yang berpengaruh serta memberikan pelatihan budaya Indonesia yang diharapkan dapat menjadi identitas ASEAN
3. Memperkuat kerja sama ekonomi komunitas ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan PIDs dalam membuat olahan pangan serta peningkatan aliran modal di kawasan ASEAN.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dengan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara dalam melakukan penelitian guna memahami berbagai fenomena manusia atau sosial dengan gambaran yang menyeluruh dan dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari informan, serta dilakukan dalam latar ilmiah (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga, penelitian ini biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan orientasi. Penelitian kualitatif juga lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari data-data yang ditemukan (Somantri, 2005).

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi Pustaka yang menurut M. Nazir merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2009). Lebih lanjut, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2015). Selain itu, penulis juga melakukan observasi partisipasi dimana penulis berpartisipasi aktif dalam lokasi penelitian. Dalam observasi partisipasi, pengamatan menjadi alat utama untuk mendapatkan data-data, sehingga peran dari partisipan atau informan kunci sangat penting untuk membantu penulis memahami perbedaan budaya dan mengambil sikap yang tepat terhadap perbedaan budaya tersebut. Dengan berpartisipasi, memungkinkan penulis untuk mencatat persepsi peneliti itu sendiri terhadap sebuah peristiwa, perasaan dan pemikiran-pemikiran yang diucapkan maupun dilakukan. Informasi-informasi ini akan sangat berguna dan saling melengkapi catatan dari penulis (Rachmawati, 2017).

F. Hasil Temuan

Kontribusi KKNi dalam Tercapainya ASEAN Community

Kontribusi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu berhasil (Cambridge University Press, n.d.). Dalam melakukan suatu